

Memerangi Terorisme Agama Pascatewasnya Noordin M. Top *Victor Silaen*

Abstrak

Tewasnya Noordin M. Top tak serta-merta membuat ancaman dan bahaya terorisme mati bersamanya. Menjadi buronan hampir sewindu, pria asal Malaysia itu menyisakan sejumlah warisan: jaringan yang kuat, cair, menyebar, mampu menyerang, dan diduga sudah terkoneksi dengan jaringan internasional. Sosoknya bahkan telah menjadi pahlawan di mata para teroris muda yang telah berhasil direkrutnya selama ini. Itu sebabnya, gerakan terorisme agama masih harus terus diwaspadai. Untuk itulah kritisisme beragama harus dikembangkan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat sipil. Selain itu mungkin sudah saatnya menyambut positif gagasan pelibatan TNI dalam memerangi terorisme, dengan sebelumnya membuat pengaturan khusus agar aparat kepolisian tidak merasa diintervensi atau dilecehkan.

“Kasus-kasus Saudi dan Pakistan menunjukkan bahwa begitu Anda membiarkan ideologi-ideologi radikal, mereka menjadi tak terkontrol, bahkan oleh negara-negara yang mengendalikannya. Itulah mengapa satu-satunya cara memerangi terror global baru ini adalah dengan memerangi ideologi yang melahirkannya di mana pun. Jadi perang melawan terror adalah benar-benar sebuah perang gagasan. Dan saya tidak yakin kita akan memenangkannya.” (Farid Zacharia, Newsweek Magazine)

Di kanan kiriku mereka berteriak, namun mataku tetap nanar. Mereka tak berhenti berceletoh... mencaci... mencela... menghina. Ya... Robbi... masukkan hamba Mu ini... ke dalam jannah abadi... bersanding dengan para bidadari (dari buku harian Gempur Budi Angkoro alias Jabir, tangan kanan Noordin M. Top, yang tewas di grebek polisi 29 April 2006)

Warisan Noordin M. Top

Akhirnya gembong teroris yang dijadikan target utama perburuan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabel Polri, yakni Noordin M. Top, bersama tiga rekannya (Bagus Budi Pranoto alias Urwah, Susilo, dan Aryo Sudarso), tertembak mati dalam penyergapan di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/9) dini hari. Namun, kerja keras polisi diperkirakan belum akan selesai. Tewasnya Noordin tak serta-merta membuat ancaman dan bahaya terorisme mati bersamanya. Menjadi buronan hampir sewindu, pria asal Malaysia itu menyisakan sejumlah warisan: jaringan yang kuat, cair, menyebar, mampu menyerang, dan diduga sudah terkoneksi dengan jaringan internasional (*Tempo*, 28 September-4 Oktober 2009).

Sejumlah tersangka teroris yang tertangkap memberikan gambaran tentang basis perekrutan kelompok ini, yakni teman, teman dari teman, kerabat, dan bahkan pekerja mereka. Itu sebabnya selalu saja muncul nama baru. Amir Abdillah, Saefudin Jaelani, Syahrir, atau Ibrohim sebelumnya hampir tak pernah muncul di media, hingga pengeboman hotel JW Marriot dan The Ritz Carlton 17 Juli 2009.

Pelarian sewindu Noordin, cerita heroiknya yang terbangun di media massa, dan kematiannya di ujung peluru polisi juga bisa menjadikan pria itu pahlawan bagi kelompoknya. Ia akan disebut “syuhada”,

martir yang membela agama hingga akhir hayat. Ini bisa memotivasi anggota kelompoknya untuk melakukan serangan balasan. Apalagi masih ada dedengkot teroris di Indonesia yang hingga kini masih berkeliaran, yakni Dulmatin (alias Noval alias Joko Pitono alias Amarusman), Umar Patek, Syaifuddin Zuhri, dan Syahrir. Keempatnya telah masuk daftar pencairan orang (DPO) Mabel Polri. Mereka dinilai memiliki kemampuan yang sama dengan Noordin, baik dalam indoktrinasi faham terorisme, merekrut teroris baru, mendeteksi intelijen Polri, menghilangkan jejak, menghimpun dana, kemampuan teknis teror termasuk merakit bom (*Suara Pembaruan*, 18/9/2009). Di samping mereka juga masih ada Zulkarnaen (alias Arif alias Sunarso alias Daud).

Dulmatin dan Zulkarnaen, khususnya, sejak 2002 telah menjadi buronan polisi dan dikenal sangat berbahaya karena masing-masing punya kemampuan dalam membuat bom dan penentu target operasi. Walaupun kedua orang ini diperkirakan sudah melarikan diri dari Indonesia, namun pengaruhnya masih sangat besar terhadap kelompoknya. Kedua buronan itu, yang diduga bersembunyi di Filipina, diperkirakan akan kembali ke Indonesia setelah mengetahui kawan seperjuangannya tertembak mati oleh Densus 88. Mungkin saja mereka merencanakan berbuat hal yang sama seperti ketika masih bersatu dengan Dr Azahari, Noordin M. Top, Imam Samudra, Amrozi dan Muklas (kelimanya sudah tewas), dalam peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Inilah tantangan berat yang harus dihadapi oleh Densus 88 pascatewasnya Noordin M. Top dkk dalam mengamankan masyarakat dari peledakan bom.

Dalam dokumen dan *laptop* yang ditemukan saat penggerebekan rumah kontrakan Hadi Susilo di Mojongso, Solo, 17 September lalu, Noordin terbukti sedang mengembangkan jaringan pembuat bom. Dokumen Solo yang ditemukan Densus 88 itu untuk pertama kali mengonfirmasi keberadaan kelompok ini. Dalam dokumen tersebut, Noordin M. Top, Syaifudin Zuhri, dan Syahrir akan melanjutkan estafet kepemimpinan dengan cara menjadikan Indonesia sebagai fron kedua perlawanan Al-Qaeda. Fron kedua ini dibutuhkan untuk mengalihkan konsentrasi gelar pasukan Amerika Serikat (AS), yang saat ini memprioritaskan penghancuran fron Al-Qaeda di Afghanistan dan Pakistan Barat. Jika fron kedua ini tercipta, Indonesia akan melihat suatu eskalasi ancaman terror ke tingkat lebih tinggi. Karakter jejaring teror Noordin M. Top, yang selama ini mengandalkan perekrutan-perekrutan local dari komunitas Jamaah Islamiyah (JI) maupun komunitas Negara Islam Indonesia (NII) akan menguat menjadi jejaring teror transnasional ini akan memperkokoh interaksi *ad hoc* yang sudah tercipta antara fron Indonesia-Moro-Pattani.

Dalam dokumen itu juga dinyatakan, pusat Tanzhim Al-Qaeda di Afghanistan secara resmi mengakui Noordin, Syahrir, Syaefudin Jaelani, dan Ibrohim sebagai pimpinan wilayah Asia Tenggara. Disebutkan pula, Al-Qaeda akan mendukung dan membela semua tindakan kelompok Noordin di Asia Tenggara. Sementara soal senjata kelompok Noordin, dijelaskan bahwa senjata tersebut adalah sisa-sisa konflik Poso 2007, namun masih terawat dengan baik. M-16 dan Baretta milik Noordin identik dengan senjata sejenis yang banyak beredar di Poso saat konflik 2006-2007. Mungkin itu sisa-sisa senjata di Tanah Runtuh, Gebang Rejo, Poso (*Jawa Pos*, 19/9/2009).

Belum tertangkapnya sejumlah buronan teroris kelas kakap tersebut, di samping kemungkinan akan munculnya kader-kader baru teroris yang selama ini telah digembleng Noordin M. Top dkk., mendorong Polri dan seluruh elemen masyarakat untuk semakin mewaspadaai aksi balas dendam menyusul penyeragaman di Solo yang menewaskan teroris kelas kakap “seharga satu miliar rupiah” dan ketiga rekannya itu. Sumber di Densus 88 mengungkapkan, guna mengembangkan penyelidikan dan

perburuan tersangka teroris, Densus akan meminta keterangan Putri Munawaroh (20), istri Susilo, yang terluka saat penyeragaman di Kampung Kepuhsari, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo. Wanita yang tengah hamil lima bulan itu kini dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. “Dia menjadi saksi kunci,” ujar Kapolri Jendral (Pol) Drs. Bambang Hendarso Danuri (*Suara Pembaruan*, 18/9/2009).

Memang, pascatewasnya gembong teroris asal Malaysia itu, sejumlah pengamat terorisme di Indonesia memprediksi bahwa ancaman terorisme belum akan berakhir. Gembong teroris yang lain, termasuk kader-kader muda teroris yang telah dibina selama ini, akan bangkit untuk aksi retaliasi. Mungkin itu sebabnya Presiden Yudhoyono, meskipun memuji kinerja Polri, tetap mengingatkan agar Polri terus bekerja keras. Menurut Yudhoyono, ada tiga akar terorisme yang perlu diatasi. Pertama, suasana keterbelakangan, kemiskinan, dan keterisolasian. Situasi ini memudahkan otak teroris merekrut pelaku bom bunuh diri. Kedua, permasalahan ketidakadilan dunia. Ada ketimpangan antara negara-negara maju dan negara berkembang serta negara miskin. Negara yang kaya tidak mau membantu yang miskin. Ketiga, adanya pemikiran radikal akibat pemahaman agama yang bertentangan dengan arus moderat agama mana pun (*Suara Pembaruan*, 18/9/2009).

Peringatan yang sama sebelumnya pernah disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Jim Steinberg, tak lama setelah terjadinya Bom Mega Kuningan II, 17 Juli 2009. Ia mengingatkan, kelompok teroris akan terus menyerang kepentingan Barat di Indonesia. Disebutkannya, peledakan bom di dua hotel di Jakarta (JW Marriott dan The Ritz Carlton) itu tidak akan menjadi serangan yang terakhir. Namun, dia memuji sikap Indonesia dalam menangani terorisme. Hanya saja, menurut Steinberg, upaya itu tidak akan bisa seratus persen berhasil (*Suara Pembaruan*, 30/7/2009).

Kekhawatiran akan adanya aksi-balas dendam itu benar. Syukurlah, polisi bergerak lebih cepat. Di tempat indekos mahasiswa di Ciputat, Tangerang, 9 Oktober lalu, Tim Densus 88 menembak mati dua kakak-beradik teroris Syaifudin Zuhri dan Muhammad Syahrir. Disinyalir, Syaifudin telah menyiapkan sejumlah penerusnya sebagai “pengantin” untuk aksi bom bunuh diri (*suicide bomber*). Ia sendiri merupakan perekrut Dani dan Nana, pelaku bom bunuh diri di Marriott dan Ritz Carlton 17 Juli 2009. Sedangkan Syahrir yang berperan sebagai perakit bom, pernah bekerja sebagai mekanik pesawat Garuda Indonesia (1992-2003), peringkat teknisi pesawat Boeing 737 series, dan pernah bekerja di beberapa perusahaan penerbangan swasta. Dari tempat keduanya disergap itu, polisi menemukan sejumlah dokumen yang berisi rencana serangan bom di sejumlah lokasi di Ibukota Jakarta (*Sinar Harapan*, 12/10/2009). “Mereka sudah merancang untuk melakukan serangan bom lagi, terutama terhadap objek-objek vital di Jakarta. Serangan itu sebagai balas dendam atas kematian gembong teroris akhir-akhir ini,” ungkap sumber kepolisian di Mabes Polri, Jakarta, 12 Oktober lalu. Syaifudin dan Syahrir rencananya akan bergerak bersama enam orang lain yang namanya masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) Mabel Polri karena dicurigai terlibat aksi teroris. Mereka adalah Baridin, Upik Lawangsa, Zulkarnain, Dulmatin, Umar Patek dan Zulfiki.

Terorisme Agama

Kembali pada peringatan Jim Steinberg yang meragukan jaringan teroris di Indonesia akan dapat diatasi hingga tuntas, apakah ia sedang melecehkan kemampuan Indonesia? Agaknya tidak, sebab ini bukan soal mampu atau tidak. Melainkan soal komitmen total pemerintah Indonesia untuk menggempur terorisme

sampai ke akar-akarnya. Dan salah satu akar itu, dewasa ini, adalah agama.¹ Sedangkan akar-akar lainnya adalah kemiskinan dan ketidakadilan.² Namun keduanya hanya dapat menimbulkan energi destruktif yang dahsyat di saat bergabung dengan agama.³ Jadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, agama dalam konteks ini berperan penting sebagai ideologi yang member legitimasi terhadap kekerasan. Begitulah agama jika direduksi menjadi “hanya” sekedar ideologi.⁴ Agama yang sejatinya merupakan sumber kedamaian, kebaikan dan kebijakan, justru menjelma menjadi sumber yang membangkitkan energi pro-kekerasan karena “dibajak” oleh orang-orang yang memiliki arogansi dan egoisme spiritual, yang merasa paling benar sendiri di dunia dan di akhirat. Bagi mereka, pihak lain sesat dan harus dihancurkan. Jika tidak, maka dunia ini akan semakin kotor dan dipenuhi dosa.

Itulah terorisme agama: sebuah gerakan yang bertujuan menebar ketakutan dan kepanikan di masyarakat luas dengan menjadikan agama sebagai basis ideology yang memberinya pembenaran sekaligus dukungan moral. Sejarah mencatat bahwa semua agama besar dunia telah pernah “dibajak” oleh para agamawan yang pro-kekerasan itu. John W. Morehead dalam *Armageddon Enters the New Age of Terrorism: A Commentary on Terrorisme and Religion*, seperti dikutip Saptaatmaja (*Sinar Harapan*, 8/11/2005), menyebut beberapa contoh terorisme yang mengusung bendera agama itu. Dari Hindu, misalnya, ditampilkan tokoh Bhagwan Shree Rajneesh, pemimpin kelompok Rajneesapuram yang pada September 1984 membuat geger Amerika, karena memerintahkan pengikutnya meracuni sebuah restoran di Oregon. Akibatnya 750 orang yang makan di restoran itu sakit. Dari agama Shinto, kita masih ingat tragedi gas sarin yang ditaburkan oleh kelompok Aum Sinriky di subway di Tokyo Maret 1995 yang menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 5.000 orang.

Dari bendera Kristen, Morehead menampilkan kelompok teroris yang sangat terkenal di Amerika dengan sebutan “Christian Identity Movement”. Gerakan ini membawa misi superioritas orang kulit putih (Arya dan Anglo Saxon) sebagai bangsa terpilih dan Amerika merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka, sehingga wajar mereka sangat anti-Yahudi, dan pendatang selain kulit putih. Mereka bilang Yesus itu bukan orang Yahudi, tetapi berdarah Arya. Pada 1987, gerakan ini dituding menebar racun pada suplai air untuk dua kota besar di Amerika, tetapi bisa digagalkan. Salah satu nama terkenal dari gerakan ini adalah Timothy McVeigh, tertuduh pemboman Gedung Federal di Oklahoma 1995.

Hal yang sama juga dapat ditemui dalam studi komparatif tentang terorisme dan agama yang dilakukan Mark Juergensmeyer. Menurut dia, gerakan-gerakan kekerasan agama memang telah menjadi fenomena penting yang mencolok di seluruh dunia sejak decade 1990-an. Gerakan-gerakan teroris berbasis keyakinan agama itu berkembang, selain di lingkungan Islam, juga di lingkungan Yahudi, Kristen/Katolik, Hindu Buddha, bahkan di kalangan berbagai sekte agama lokal seperti Shinto di Jepang, atau Sikh di India.⁵

Namun, bukankah agama sejatinya berorientasi perdamaian> tidaklah ia sebenarnya *innocent* dari tindakan-tindakan kekerasan? Mengapa ia dapat membenarkan kekerasan, yang membuatnya tampil

¹ Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama* (terj. Amien Rozany Pane), Yogyakarta: Tarawang Press, 2003.

² Juwono Sudarsono, “Terorisme dalam Perpekstif Pertahanan Nasional dan Dimensi Internasional”, makalah disampaikan dalam kuliah umum untuk mahasiswa Fisipol UKI, Jakarta, 24 Agustus 2007.

³ Juergensmeyer, *op.cit.*

⁴ Tissa Balasuriya, *Teologi Siarah*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.

⁵ Juergenmeyer, *op.cit.*

sebagai “agama kekerasan” (*violence religion*)? Apa sebabnya perintah suci ilahi tentang destruksi diterima sedemikian rupa oleh sebagian umat beriman?

Tak dapat disangkal, setiap agama memiliki elemen-elemen keras (*hard elements*) dan elemen-elemen lunak (*soft elements*).⁶ Karena itulah, dalam setiap agama, selalu saja ada kelompok yang memahami agamanya secara kaku dan terlalu bersemangat, sehingga memunculkan sikap-sikap fundamentalistik dan radikal yang cenderung pro-kekerasan. Karenanya, tak jarang, kelompok agama yang bersangkutan sanggup melakukan aksi-aksi terror, yakni aksi-aksi kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau didorong oleh motif tertentu, dengan cara mengeksploitasi ketakutan masyarakat luas, sementara kelompok teroris itu sendiri berupaya menyembunyikan diri mereka.⁷ Jadi, ibarat perang, aksi terror dapat disamakan dengan perang psikis (*psywar*): yang penting dan utama adalah pihak lawan merasa sangat cemas dan panik, sehingga, mau tak mau, mereka akhirnya mengakui “keunggulan” kelompok teroris itu.

Terkait itu ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Pertama, apa yang bisa menjadi “daya tarik” maupun “daya dorong” aksi-aksi teror. Dalam banyak peristiwa terorisme di berbagai belahan dunia selama ini, agamalah yang tercatat sebagai “daya tarik” dan “daya dorong” yang utama itu. Harus diakui, agama mampu meniupkan badai yang amat dahsyat bagi praktik-praktik terorisme, meskipun tanda-tanda terorisme agama itu bisa serupa dengan ciri-ciri terorisme yang diembuskan oleh aksi-aksi para teroris yang semata dimotivasi oleh harapan-harapan perolehan politik (*political gain*). Namun, yang menarik di seputar terorisme agama adalah bahwa ia secara eksklusif bersifat simbolik dan cara-caranya luar biasa dramatis. Pergelaran kekerasan dibarengi dengan klaim justifikasi moral dan absolutisme yang amat kuat. Artinya, yang menjadi tujuan utama mereka adalah menegakkan kebenaran ilahi – menurut versi dan tafsir mereka sendiri.

Jadi, jangan heran kalau mereka kebanyakan adalah orang-orang yang baik dan saleh. Melakukan kejahatan bukanlah tabiat, “dunia penuh kekerasan” pun bukan habitat mereka. Aksi teror, bagi mereka hanyalah keterpaksaan yang harus ditempuh demi terwujudnya tatanan dunia atau negeri baru seperti yang senantiasa diimpikan. Atas dasar itulah maka jatuhnya para korban dikarenakan aksi-aksi terror mereka sebenarnya bukanlah didorong keinginan untuk membunuh. Melainkan, demi menyampaikan pesan-pesan kepada penguasa atau kekuatan sekuler yang hendak dilumpuhkan bahwa mereka eksis dan sedang memperjuangkan sesuatu. Sedangkan kepada masyarakat luas, mereka juga mengumumkan bahwa para pembaharu dan pejuang ilahi sudah muncul. Dunia yang penuh dosa ini akan berubah menjadi dunia baru yang dipenuhi kedamaian dan keadilan. Maka agar tak berlama-lama lagi, aksi-aksi nirkekerasan harus ditinggalkan demi memperoleh solusi yang lebih kuat.

Begitulah, justifikasi atas kekerasan dalam gagasan-gagasan yang bernuansa agama membuat para aktivisnya sanggup melakukan aksi bom bunuh diri (*suicide bomb*) dengan keyakinan bahwa mereka mengikuti kebenaran ilahi. Mereka menganggap diri sebagai pembela akidah agama leluhur, yang dianggap sedang terancam dan terhina oleh aspek-aspek kehidupan modern yang sangat sekularistik. Itu sebabnya mereka juga selalu menggunakan simbol-simbol dan bahasa agama.

⁶ Robert Spencer, *Islam Ditelanjangi* (terj. Mun'im A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 2003).

⁷ Jose cassanova, *Public religions in the Modern World*, Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Karena dilatarbelakangi oleh keyakinan agama, karakteristik lain dari terorisme baru ini adalah kemampuannya yang luar biasa dalam merekrut pasukan berani mati. Bom bunuh diri merupakan ciri utama dari operasi jaringan teroris Al-Queda. Meskipun penggunaan satu atau dua pelaku bom bunuh diri rutin dilakukan oleh kelompok seperti Hisbullah, Hamas atau Serigala Tamil Sri Lanka, jaringan Al-Queda telang menggunakan operasi bom bunuh diri lebih banyak dari kelompok teroris tradisional.

Kedua, perjuangan kelompok teroris agama ini biasanya melibatkan beberapa generasi demi meraih puncak keberhasilan. Jadi, mereka tak muncul tiba-tiba dan tak pula berjuang sendiri. Selalu ada pihak-pihak yang siap memberi dukungan, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketiga, kelompok teroris agama biasanya juga merupakan kelompok-kelompok marjinal di masyarakat dan di tengah komunitas agama mereka sendiri. Itulah sebabnya aksi kekerasan mereka kerap merupakan sebetulnya upaya untuk menyeimbangkan marjinalitas; sebagai suatu cara mengukuhkan status sosial mereka di dalam masyarakat dan memperkuat identitas mereka di tengah komunitas agama.

Dalam studi-studi tentang terorisme, fenomena terorisme agama sebenarnya tergolong baru. Kemunculannya kian menguat setelah AS secara resmi mengumumkan kebijakannya memerangi terorisme di seluruh dunia. Pasca peristiwa “911” yang meluluhlantahkan gedung kembar World Trade Centre, AS memang marah besar kepada kaum teroris agama ini. Apalagi sebelumnya, 1993, gedung yang sama itu sudah dibom untuk pertama kalinya. Saat itu, Ramzi Yousef, si pelaku, membawa bom mobil yang kalau saja tak berhasil dicegah bisa menumbangkan simbol kapitalisme AS itu dan membunuh ribuan orang. Dua tahun kemudian, teroris yang sama bermaksud meledakkan 12 pesawat penumpang Boeing 747 yang sedang terbang di atas Samudera Pasifik. Untinglah, rencana gila itu bisa digagalkan.⁸

Menurut Kurt Campbell dan Michelle Flournoy dalam buku *To Prevail: An American Strategy for the Campaign Against Terrorism* (2002), terorisme baru sangat berbeda dengan terorisme tradisional karena dilatarbelakangi masalah agama dan karakteristiknya yang muncul dari penggunaan simbol-simbol dan konsep-konsep agama. Terorisme baru itu berusaha mewujudkan redistribusi kekuasaan global dan sebuah revolusi politik yang bisa menghentikan hegemoni AS dan sekutu Barat-nya. Misalnya saja pemimpin Al-Queda Osama bin Laden yang mengeluarkan gatwa dan menjelaskan posisinya yang sangat jelas dalam istilah-istilah agama. Dalam fatwanya tahun 1998, Osama mendesak “*all those who believe in Allah and his prophet Muhammad must kill Americans wherever they find them*”. Upaya untuk mengusir militer AS dari Teluk Persia dijelaskan dalam bahasa agama sebagai “*removing a blasphemy a violation of religious law*”.

Bin Laden dan kelompoknya mengutip ayat-ayat suci Al-Quran untuk membenarkan pembunuhan; sesuatu yang salah kaprah, karena Islam tak ada hubungan sama sekali dengan terorisme. Jika teroris tradisional yang sekuler biasanya memilih-milih sasaran korbannya, maka teroris berlatar agama sering berupaya memusnahkan musuhnya dalam skala besar dan habis-habisan. Bagi pelaku terorisme baru ini, kekerasan adalah tindakan suci yang didasarkan pada pemahaman atas kewajiban menjalankan ajaran agamanya dan penafsiran atas perintah Tuhan. Bruce Hoffman, penulis buku *Inside Terrorism*, mengatakan bahwa kekerasan dianggap oleh teroris generasi baru sebagai “tugas mulia” atau “perbuatan suci”. Maka tak heran jika seorang Amrozy yang divonis hukuman mati dapat tersenyum lebar dan mengacungkan jempol tanda kemenangan. Itulah pula sebabnya mengapa Imam Samudra, yang juga

⁸ Juergensmeyer, *op.cit.*

dituntut hukuman mati karena keterlibatannya dalam kasus Bom Bali, juga mengucap syukur karena hukuman mati itu “akan semakin mendekatkan dirinya dengan Tuhan”.

Karena dilatarbelakangi oleh masalah keyakinan agama, terorisme baru ini juga memiliki ciri lain, yakni kemampuannya yang luar biasa dalam merekrut pasukan berani mati. Bom bunuh diri merupakan ciri utama dari operasi jaringan teroris Al-Queda. Meskipun penggunaan satu atau dua pelaku bom bunuh diri rutin dilakukan oleh kelompok seperti Hisbullah, Hamas, atau Serigala Tamil Sri Lanka, jaringan Al-Queda telah menggunakan operasi bom bunuh diri lebih banyak dari kelompok teroris tradisional. Dalam peristiwa pengeboman Kantor Kedubes AS di Afrika, setidaknya empat teroris tewas dalam serangan bunuh diri itu. Serangan terhadap kapal induk USS Cole juga menggunakan dua pelaku bom bunuh diri. Akan halnya serangan 11 September 2001 merupakan yang terbesar, dengan mengerahkan sebanyak 19 pelaku bunuh diri yang membajak sejumlah pesawat penumpang dan menjadikannya sebagai senja pemusnah missal. Kasus Bom Bali, Bom Marriott, dan Bom Kuningan juga menggunakan bom bunuh diri, sehingga diduga kuat terkait dengan operasi Al-Queda.

Simbol yang dijadikan sasaran serangan oleh terorisme baru ini juga penting untuk digarisbawahi. Sejak Kedubes AS di berbagai penjuru dunia makin sulit (*harder*) untuk diserang, karena pengamanannya yang sangat ketat, maka para teroris baru mengubah sasaran ke arah yang lebih mudah (*softer*) berupa pusat-pusat hiburan, hotel, kafe, dan sekolah. Namun, fokusnya tetap sama dan dijaga: bahwa tempat-tempat itu merupakan lambang kekuatan AS dan Barat. Paddy’s Café di Bali, Hotel JW Marriott, dan Kantor Kedubes Australia di Kuningan, Jakarta, jelas bukan sembarang tempat untuk dibom para teroris itu.

Satu hal lagi dari terorisme baru yang ditakutkan oleh AS adalah kemampuannya untuk melakukan serangan dengan senjata pemusnah massal, seperti senjata kimia, biologi, dan bahkan nuklir. Ini bukan hal yang mengada-ada. Kelompok sekte agama Aum Shinrikyo pernah menyebarkan gas sarin di kereta bawah tanah di Tokyo. Kesaksian-kesaksian di pengadilan menyebutkan adanya upaya-upaya kelompok terorisme baru untuk mendapatkan senjata kimia dan biologi. AS sangat yakin, Al-Queda akan menggunakan senjata pemusnah massal jika jaringan teroris itu memilikinya (Yulianti, 2003).

Pada 1980, mengutip data yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS mengenai daftar organisasi teroris internasional, hanya ada satu organisasi keagamaan yang dikategorikan sebagai organisasi teroris, sementara selebihnya merupakan organisasi teroris politik non-agama. Dibandingkan dengan fakta tersebut, data 1998 menunjukkan perkembangan yang mencengangkan: dari 30 organisasi teroris di seluruh dunia yang dianggap paling berbahaya, lebih dari separuhnya adalah organisasi keagamaan.⁹ Sementara itu menurut kajian internasional mengenai masalah terorisme, proporsi kelompok-kelompok keagamaan terus mengalami peningkatan mulai dari 16 dari 49 kelompok teroris yang diidentifikasi pada 1994, menjadi 26 dari 56 kelompok yang terdaftar pada tahun berikutnya.¹⁰

Mengapa muncul kecenderungan bahwa gerakan terorisme agama mengalami peningkatan selama beberapa dekade terakhir ini? Beberapa studi mengenai isu ini mencoba menjelaskan kaitan antara agama dan kekerasan sebagai semacam penyimpangan, suatu akibat dari ideologisasi atau politisasi agama, atau sebagai sesuatu yang bersifat karakteristik dari perkembangan fundamentalisme – yang pada

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bruce Hoffman (1988), seperti yang dikutip Juergensmeyer, *Ibid.*

dirinya merupakan bentuk *mutant* suatu agama. Sementara kajian lain menjelaskan bahwa kekerasan agama kerap dilihat sebagai penguatan identitas budaya berdasarkan afiliasi agama, yang biasanya muncul dalam bentuk komunalisme, lebih daripada bersumber pada ajaran keimanan agama itu sendiri. Komunalisme muncul akibat terjadinya situasi di mana pengorganisasian identitas-kolektif-berafiliasi-agama juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik pada umumnya, yang bisa saja bertentangan dengan kepentingan dengan komunitas orang beriman dari agama yang sama di wilayah lain dan dalam konteks yang berbeda.¹¹

Perihal Teror, Teroris, dan Terorisme

Teror, terorisme dan teroris adalah tiga kata yang satu sama lain saling terkait namun makna yang berbeda. Ketiganya berasal dari bahasa Latin *terrere (to scare, to terrify)*.¹² Menurut Griffith dan Terry O'Callaghan, terorisme adalah sebuah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan telah terlebih dahulu direncanakan, di mana dalam penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Biasanya, aksi terorisme dijalankan dengan perencanaan yang baik dan kemampuan strategis yang tepat. Menurut mereka terorisme bukanlah suatu tindakan yang irasional. Karena dampak utama dari tindakan terorisme adalah menciptakan sebuah psikologis seseorang memiliki rasa panik, ketakutan, dan kewaspadaan pada level masyarakat. Itu sebabnya terorisme dapat menyerang siapa saja (mulai dari personil militer hingga staf kedutaan), tetapi biasanya target Terorisme itu menyerang masyarakat sipil.¹³ Sebagaimana diketahui, pasca Tragedi WTC, AS betul-betul serius untuk menumpas siapa saja yang dianggap teroris atau mendukung dan melindungi teroris. Waktu selama Perang Dingin AS melaksanakan Politik Pembendungan Baru (*New Containment Policy*) terhadap teroris dan ideologi terorismenya.¹⁴

Jika dulu AS mengembangkan Doktrin Pembendungan dan Pencegahan (*Containment and Deterrence*), maka saat ini AS mengembangkan 'Doktrin Ofensif' yang menggunakan pola serangan dini (*preemptive attack*) dan intervensi defensif (*defensive intervention*) demi memerangi musuh-musuh barunya.¹⁵ Hak itu disebabkan oleh pengaruh AS yang besar di dunia, maka dalam waktu yang relatif singkat terbentuklah koalisi global melawan teroris, buktinya, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah merumuskan Resolusi No. 1373 yang dianggap resolusi paling komprehensif sebagai batu pijakan

¹¹ Dikutip dari A.E Priyono, "Fenomena Terorisme Agama", dalam *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2003.

¹² Simon Bunjamin, "Terror and Terrorism – Threat with a Tradition: The History and Development of Terror and Terrorism" dalam Norbert Eschborn., ed., *Democratizations and the Issues of Terrorism in Indonesia* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005, hlm. 1.

¹³ Griffins, Martin and Terry O'Callaghan, *International Relation: The Key Concepts*: London and New York Routledge, 2002.

¹⁴ Dalam makalahnya yang tidak dipublikasikan Parsudi Supartan menulis bahwa Pemerintah AS menggunakan teori politik pembendungan (*the politics containment*) yang baru, yang modelnya mengacu pada keberhasilan politik pembendungan yang lama, yang dilakukan dengan cara membangun dan memperkuat pakta-pakta anti-terorisme dengan bekas-bekas sekutunya selama perang dingin beberapa waktu lalu, dan dengan negara-negara Islam atau yang penduduknya muslim. Indonesia termasuk dalam kategori yang diharapkan turut berpartisipasi dalam politik pembendungan baru tersebut. Politik pembendungan baru ini merupakan politik luar negeri yang dijalankan oleh Pemerintah AS pasca Tragedi WTC, yang bertujuan untuk menghentikan terorisme dengan cara mengambil tindakan cepat dan tegas, menggunakan kekuatan militer, sehingga kegiatan terorisme di massa mendarang tidak berkelanjutan.

¹⁵ T. Yulianti, "Doktrin Baru Pertahanan AS" dalam *Harian Suara Pembaruan*, 15 Juli 2002.

menghadapi aksi teroris global. Resolusi yang mengikat 189 negara ini mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk mencari, menghukum, atau mengekstradisi teroris yang ditemukan di wilayahnya. Resolusi itu juga mengundang negara-negara untuk saling bertukar informasi mengenai jejaring teroris dan membekukan aset maupun membendung dananya.¹⁶

Akan halnya Budi Hardiman menguraikan teorisme politis dari karakteristik teorisme yang hampir mirip dengan apa yang diuraikan oleh Laquer, yaitu: (1) merupakan intimidasi yang memaksa; (2) memakai pembunuhan dan penghancuran sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu; (3) korban bukan tujuan melainkan sarana; (4) target dipilih, bekerja secara rahasia, tujuannya publisitas; (5) pesan aksi jelas walau personal ; (6) pelaku dimotivasi oleh idealism yang keras (*hard-core*).¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, terorisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham (ideologi) yang membenarkan kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan cara menebar ketakutan di masyarakat luas, sehingga pihak lawan yang sebelumnya selalu menjadi penghambat bagi terwujudnya tujuan tersebut akhirnya dapat dikalahkan.¹⁸ Teror identik dengan kekerasan. Tapi, tidak setiap aksi kekerasan dapat digolongkan sebagai teror. Karena, dalam konteks ini, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi: (1) pelaku teror adalah kelompok-kelompok non-negara dan biasanya mereka menyembunyikan diri; jika dalam perang konvensional musuh bisa dipetakan, dalam perang melawan terorisme sulit diperangi; (2) aksi teror yang dilakukan sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membunuh masyarakat sipil (kecuali aparat negara), dan walaupun ada masyarakat sipil yang terbunuh, hal itu merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari atau keterpaksaan belaka; (3) pelaku teror jumlahnya hanya segelintir saja dibanding jumlah masyarakat di suatu wilayah yang mengalami teror, namun jejaring mereka bisa sangat luas melintasi batas-batas negara.

Tujuan utama aksi terror sebenarnya bukanlah kehancuran harta-benda dan kematian jiwa-raga, melainkan efek kengerian, kepanikan, dan trauma yang diharapkan semakin menyebarluas melalui diseminasi oleh media massa cetak, elektronik, dan digital. Biasanya aksi tersebut disertai dengan kekerasan fisik, tapi bisa juga dengan kekerasan non fisik semisal melalui penyebaran virus-virus penyakit berbahaya. Sementara pelakunya kerap bersembunyi, tapi bisa juga sekaligus mengorbankan diri (mati) bersamaan dengan aksi teror yang dilakukannya.

Para pelaku teror berharap, aksi mereka akan menjadi “tontonan global” yang disaksikan jutaan orang di mana-mana. Karena, semakin banyak dan gencar media massa menyebarluaskannya, semakin dahsyat pula efek negatif yang ditimbulkannya. Jika hal itu tercapai, maka para pelakunya berharap dapat memperoleh “keuntungan politik” (*politicus horrobilis*) atau melakukan “pertukaran politik (*political exchange*) demi mencapai tujuannya (*Kompas*, 21/10/2002).

Aksi terorisme biasanya melibatkan sejumlah orang, tapi hanya dalam kelompok kecil saja. Sebagai paham, ia meniscayakan kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan-tujuannya, baik yang

¹⁶ Kusnanto Anggoro, “Kerja Sama Masyarakat Internasional Vs Franchisasi Gerakan Teror” dalam Harian *Kompas*, 14 Oktober 2001.

¹⁷ F. Budi Hardiman, “Terorisme: Paradigma dan Definisi, dalam Rusdi Marpaung, ed., *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2003), hal. 4-5.

¹⁸ Parsudi Suparlan, “Politik Pembendungan Baru?”, makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Progam Kajian Wilayah Amerika, Pascasarjana UI, Jakarta, 15 Oktober 2001.

bersifat politik, agamis, motif balas dendam, dan lain sebagainya.¹⁹ Karena itulah ia juga dapat digolongkan sebagai kekerasan kolektif, sedangkan sebagai kejahatan ia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Berdasarkan itu, sebenarnya hal yang wajar jika secara yuridis ia harus diperhadapkan dengan produk hukum yang “luar biasa” pula.

Dalam perspektif politik, akar terorisme, salah satunya, adalah ekstremisme (*Kompas*, 15/10/2002). Orang-orang dengan isme ini merasa atau memikirkan dirinya lebih unggul dari orang-orang lain yang tidak sama atau sekelompok dengan mereka. Sebaliknya, mereka memandang orang-orang lain jauh lebih rendah atau dengan cara yang melecehkan. Isme ini tertanam dalam ideologi atau agama (tapi bukan agama *mainstream*, melainkan sempalan atau sekte). Biasanya mereka adalah orang-orang yang berpikir simplistik, semisal “saya benar dan baik, kamu salah dan jahat”. Itulah sebabnya, mereka selalu menutup diri (eksklusif) untuk menerima kebenaran alternatif dari orang-orang lain. Dan karena itulah, demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini, mereka tak segan-segan melakukan kekerasan, yang sebenarnya riskan bagi diri sendiri, bahkan jika perlu dengan mengorbankan dirinya sampai mati sebagaimana disebut di atas (ingatlah Peristiwa “911” di Amerika Serikat tahun 2001 dan aksi-aksi bom bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina).

Faktor lain, yang juga bisa menjadi akar terorisme, adalah cita-cita separatisme dari sekelompok orang (dalam arti, ingin memisahkan diri dari kedaulatan suatu negara). Karena tidak pernah mendapatkan dukungan atau persetujuan, tidak heran jika gerakan orang-orang yang ingin merdeka ini kerap melakukan aksi-aksi terror untuk memberikan *sign* bahwa mereka tetap eksis dan tak bisa dipandang sebelah mata. Terkait dengan faktor ini, atau juga faktor di atas tadi, terkadang motif dendam atau sakit hati juga bisa memperbesar dorongan bagi sekelompok orang untuk melakukan aksi-aksi terror kepada pihak tertentu yang di masa silam telah menjadi sumber masalah di dalam kehidupan mereka.

Sasaran Teroris Agama: AS dan Barat

Catatan tentang aksi-aksi terorisme dalam beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini diduga sebagai pelakunya atau terlibat dalam aksi teror adalah mereka yang beridentitaskan Islam. Mungkinkah itu sebuah kebetulan belaka? Sementara yang selama ini banyak dijadikan sasaran aksi teror atau korban teror adalah orang-orang Barat, utamanya AS (termasuk negara-negara yang berhubungan erat dengannya). Memang, sejak Kedubes AS di berbagai penjuru dunia makin sulit untuk diserang karena pengamanannya yang ekstra ketat, kelompok teroris baru mengubah sasaran mereka kepada yang lebih mudah (*softer*) berupa pusat-pusat hiburan, hotel, kafe, dan sekolah. Namun, fokusnya tetap sama: tempat-tempat yang merupakan lambang kekuatan AS dan Barat. Paddy’s Café Bali, Hotel JW Marriott dan The Ritz Carlton di Jakarta merupakan contoh-contoh konkret tentang itu. Apakah ini pun sebuah kebetulan belaka?

Pertanyaan berikut: adalah hubungan di antara keduanya, antara pelaku dan sasaran atau pihak korban? Kalau ada, bagaimana hal itu dapat dijelaskan? Juergensmeyer mencatat setidaknya ada empat alasan mengapa AS dijadikan sasaran terorisme agama. Pertama, AS dianggap menjadi pendukung rezim-rezim sekuler, termasuk Dunia Muslim, yang menjadi musuh utama mereka. Kedua, AS juga dinilai menjadi musuh langsung maupun tak langsung karena peranannya dalam memajukan kebudayaan modern

¹⁹ Walter Laquer, “Reflections in Terrorism”, dalam *The Global Agenda, Issues and Perspectives*, oleh Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf (ed.), New York, McGraw-Hill, Inc., 1992, hal. 107-108.

yang dianggap mempromosikan nilai-nilai imoral, individualisme, materialisme, dan nilai-nilai lain yang khas “*American Style*”. Ketiga, alasan yang bersifat ekonomi, karena AS dianggap mendominasi kekuatan ekonomi global. Keempat, ancaman kapitalis global bercorak AS itu dianggap akan membawa kegelapan bagi negeri-negeri Muslim. Keempat alasan inilah yang digemakan oleh Osama bin Laden untuk menyatakan bahwa Dunia Islam harus mendeklarasikan perang melawan AS dan sekutu-sekutunya karena kejahatan mereka di muka bumi.²⁰

Sementara ahli politik Samuel Huntington menjelaskan bahwa benturan peradaban dewasa ini merupakan penyebab bangkitnya kekuatan di dunia Timur untuk melawan dunia Barat. Ia secara kontroversial mengatakan bahwa masa depan politik global akan didominasi oleh konflik antarbangsa yang berbeda peradaban.²¹ Dalam kenyataannya, memang, di satu sisi, peradaban Barat (utamanya AS) yang modernis kian lama kian menghegemoni dunia. Didorong hal itulah maka di sisi lain cenderung terjadi penolakan atau perlawanan oleh orang-orang dari peradaban yang belum semodernis Barat tapi ingin menyaingi Barat. Dalam rangka itulah, maka mereka mengidentifikasi modernisasi sebagai westernisasi. Upaya pencitraan seperti itu tentu diharapkan dapat membangkitkan semangat penolakan atau perlawanan yang dibungkus dengan tujuan “berkompetisi”.

Dalam kaitan itu, menurut Huntington, aspek agama merupakan sesuatu yang paling mudah untuk dijadikan atau dianggap sebagai “roh” peradaban. Maka, dalam rangka menolak atau melawan hegemoni Barat itu, identitas agama pun dimunculkan dan diaktifkan sehingga terjadilah pengelompokan dua kubu: Barat dan non-Barat atau Kristen dan Islam (Huntington menambahkan Konghucu dalam kubu ini). Seiring arus deras globalisasi yang mendorong terjadinya revitalisasi agama, agama, maka konflik-konflik peradaban yang didasari perbedaan agama ini pun semakin kerap dan banyak terjadi di mana-mana.

Sementara itu, terjadilah apa yang disebut Kebangkitan Islam, yang didorong maupun diperkuat pula oleh kemajuan ekonomi negara-negara Asia. Dengan bertambahnya keyakinan akan kemampuan diri sendiri, maka umat Islam pun menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan satu-satunya sumber identitas, makna, stabilitas, legitimasi, kemajuan, kekuatan, dan harapan, yang dinyatakan melalui slogan “Islam adalah jalan keluar”. Ini dapat dilihat sebagai perwujudan dari penerimaan terhadap modernitas, tetapi sekaligus penolakan terhadap peradaban Barat. Seperti dikutip Huntington, seorang pejabat tinggi Saudi, pada 1994, mengungkapkan hal itu sebagai berikut: “Impor asing memang menakjubkan atau ‘segala sesuatu’ yang berteknologi tinggi. Namun, institusi-institusi sosial dan politik yang diimpor dari mana pun juga dapat menjadi ancaman yang berbahaya. Tanyakan pada Syah Iran... Islam bukan sekedar agama, tapi juga sebagai *way of life*. Kami, orang Saudi, menginginkan modernisasi, tapi bukan westernisasi.”

Demikianlah, Kebangkitan Islam merupakan pengejawantahan upaya-upaya yang dilakukan umat Islam untuk mencapai tujuan itu. Ia adalah sebuah bentuk luas dari gerakan intelektual, kultural, sosial, dan politis yang menyebar di seluruh dunia Islam. Dalam kata-kata Ali E. Hilel Dessouki, seorang sarjana Islam terkenal seperti dikutip Huntington, Kebangkitan Islam merupakan perwujudan upaya-upaya untuk menerapkan (menggantikan) hukum Barat, yakni dengan hukum Islam, penggunaan bahasa dan simbolisme keagamaan, perluasan pendidikan Islam, penerapan ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku sosial, semakin maraknya kegiatan keagamaan, didominasi oposisi terhadap

²⁰ Juergensmeyer, *op.cit.*

²¹ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, New York: Simon and Achuster Inc., 1997.

pemerintahan-pemerintahan sekular oleh kelompok-kelompok Islam, dan berkembangnya solidaritas internasional di kalangan masyarakat muslim dan negara Islam. Sementara di sejumlah negara, elemen islamisasi terpenting itu adalah pengembangan organisasi-organisasi sosial Islam dan pengambilalihan organisasi-organisasi yang telah ada sebelumnya oleh kelompok-kelompok Islam. Di sisi lain, pada saat yang hampir bersamaan, muncullah gerakan-gerakan untuk mencapai modernisasi islami dengan corak-ciri perjuangan dari muali yang moderat sampai yang revolusioner.

Persoalannya, bernarkah dewasa ini tengah berlangsung konflik antar peradaban sebagaimana yang dikatakan Huntington itu? Saya cenderung menyetujuinya, namun sekaligus saya ingin mengatakan bahwa dalam beberapa hal atau aspek kehidupan, hegemoni Barat (utamanya AS) memang terkesan arogan, sehingga karena itulah di berbagai belahan dunia muncul penolakan atau perlawanan yang jika mungkin bahkan menyainginya. Menurut saya, hal itu sah-sah saja. Impian menjadi “nomor satu” seperti AS, tentu baik adanya. Hanya saja, soalnya adalah bagaimana cara mewujudkan impian itu. Jika mengaku diri beradab, tentu saja pilihannya adalah “jalan nir-kekerasan”. Atas dasar itu, maka aksi-aksi teroris haruslah ditolak – karena ia tak layak menjadi pilihan orang-orang beradab.

Itu berarti beragama tak cukup hanya saleh, tetapi juga harus cerdas dan kritis. Jika semua umat beragama memiliki dan menghayati kedua hal itu di dalam kehidupan beragamanya, maka yang niscaya nampak dari dan ke luar adalah energi-energi yang menjadi sinergi dahsyat untuk memerangi masalah-masalah ketidakadilan, ketidakbenaran, ketertindasan, kemiskinan, dan yang sejenisnya. Sebaliknya, ia mustahil menjadi kekuatan yang mengerikan karena kekerasan demi kekerasan yang dilahirkan dari atau olehnya. Kecuali, ia memang sengaja diinterpretasi untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari hakikat agama itu sendiri. Tapi, jikapun hal sedemikian terjadi, agama tetap tak bisa dijadikan sang terdakwa. Karena, yang salah sesungguhnya adalah orang-orang yang menginterpretasinya secara tak bertanggung jawab. Jadi, Islam tak identik dengan teroris, dan sebaliknya teroris tak identik dengan Islam. Begitupun agama-agama lainnya.

Terorisme Agama di Indonesia

Lalu, bagaimana kita harus menyikapi masalah terorisme agama ini di Indonesia? Tak bisa tidak, kita harus mengakui bahwa gerakan dan jejaring terorisme agama telah berkembang subur di Indonesia. Fenomena terorisme yang mengusung spirit agama mulai merebak sejak terjadinya Bom Malam Natal (2000) yang mengguncang sejumlah gereja di beberapa kota. Memang, pascamundurnya Soeharto dari pentas politik nasional (21 Mei 1998), tercatat banyak kasus bom terjadi di Indonesia. Tahun 1998 ada 6 kasus, 1999 ada 7 kasus, 2000 ada 32 kasus, 2001 ada 65 kasus, 2002 ada 16 kasus. Demikian laporan resmi yang dikeluarkan oleh KontraS (sebuah organisasi non-pemerintah di Indonesia yang konsern dengan masalah-masalah korban kekerasan dan orang hilang).²²

Kasus-kasus peledakan bom tersebut relatif tak terlalu menjadi sorotan masyarakat luas sampai akhirnya terjadi Tragedi 11 September 2001 (atau yang kerap juga disebut “911”) yang mengguncang Amerika Serikat dan negara-negara lain di seluruh dunia. Al-Queda, yang diduga kuat menjadi dalang di balik serangan biadab kaum teroris itu, membuat terorisme agama sejak itu menjadi wacana. Apalagi

²² Lihat situs web www.prakrasa-rakyat.org (diakses 20 Agustus 2009), juga www.christiapost.co.id (diakses 20 Agustus 2009).

Osama bin Laden, pemimpin kelompok teroris tersebut, selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan berdimensi religius di berbagai media.²³

Setahun setelah Tragedi “911”, terjadilah Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Terkait itu kita patut menyesali kinerja Pemerintah Megawati yang begitu lamban. Sebab menurut Jurubicara Badan Intelijen Negara (BIN) Muchyar Yara, informasi tentang keberadaan teroris global itu sudah kerap disampaikan sejak terjadinya Tragedi “911”. Bahkan Panglima TNI saat itu, jenderal Endriartono Sutarto, pun pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang membenarkan adanya sel-sel teroris itu di Indonesia. Namun, apa sikap para penyelenggara negara, khususnya pemerintah? Tenang-tenang saja, terkesan seperti tidak mempercayai informasi-informasi tersebut. Atau mungkin percaya, tapi tidak menganggapnya sebagai ancaman yang serius. Saat itu Wakil Presiden Hamzah Haz bahkan membantah keras bahwa kelompok-kelompok teroris ada di Indonesia. “Tidak ada, tidak ada teroris di Indonesia”, katanya tatkala para wartawan meminta komentarnya perihal dugaan adanya sel-sel teroris global di negeri ini. “Rakyat Indonesia bisa marah bila Pemerintah AS terus-menerus mengatakan di negara ini ada sel-sel terorisme global”, katanya pada kali yang lain. Atau, pernah juga ia bicara begini: “Kalau ada teroris, saya orang pertama yang akan menangkapnya”. Padahal, ketika itu Dr. Azahari dan kaki-tangannya yang orang-orang Indonesia sudah aktif melancarkan teror bom di berbagai kota.

Hampir sama dengan Hamzah Haz, Presiden Megawati pun kemudian menyatakan Indonesia bukan sarang teroris. Padahal dua tahun sebelumnya, salah satu pembantu terdekatnya sendiri, yaitu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, mengungkapkan keberhasilan anak-buahnya membongkar tempat latihan teroris di Poso. Ketika itu Hendropriyono dikecam berbagai kalangan dalam negeri, khususnya kalangan organisasi non-pemerintah (ornop). Polisi pun menolak permintaan BIN untuk mengejar para teroris di Poso dengan alasan informasi dari BIN itu baru sebatas data intelijen, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

Berikutnya, ketika Majalah Time menurunkan laporan tentang “informasi bocoran” dari Dinas Intelijen Amerika (CIA), berdasarkan pengakuan Umar Al-Farouq bahwa Abu Bakar Ba’asyir adalah salah satu operator jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara, dengan gagahnya Hamzah haz menantang untuk menangkap dirinya terlebih dulu sebelum menangkap Ba’asyir. Namun tak lama kemudian, ia berubah sikap. “Silahkan aparat kepolisian menangkap Ba’asyir, asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku”. Tetapi, sebelumnya ia terlebih dulu menyalahkan kerja aparat dan intelijen Indonesia yang dinilainya lamban.

Tak pelak, saat itu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono pun marah kepadanya. “terus-terang saya tersinggung dengan ucapan Bapak Wakil Presiden di luar, yang menyebut kami hanya NATO (no action, talk only)”. Begitu pula Kepala BIN Hendropriyono, yang ikut mengecam pernyataan Hamzah Haz di sejumlah media massa. Menurut dia, kata-kata itu tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil presiden. Tak dapat dihindari, rapat kabinet, Senin, di Istana Merdeka, setelah Bom Bali itu pun diwarnai ketegangan. Sementara Presiden Megawati Soekarnoputri hanya bisa berdiam saja ketika menyaksikan perdebatan panas di antara beberapa anak-buahnya itu (*Tempo*, edisi 21-27 Oktober 2002).

Setelah Bom Bali I, aksi-aksi terorisme melalui peledakan bom terulang kembali dalam peristiwa serupa di Hotel JW Marriot, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, tahun 2003 (disebut Bom Mega

²³ Juergensmeyer, *op.cit.*

Kuningan I). Setahun kemudian, 2004, ledakan bom dahsyat yang dibawa oleh sebuah mobil menghancurkan kantor Kedutaan Besar Australia yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Tahun 2005, lagi-lagi Bali diguncang bom bunuh diri. Sementara itu sejumlah pelaku Bom Bali I, yakni Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhals, sedang menjalani proses hukum atas tindakan biadab yang mereka lakukan. Tiga sekawan itu seakan membuka tabur untuk menelusuri keterlibatan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang diduga kuat sebagai gerakan terorisme agama di Indonesia sebagaimana dikatakan pengamat terorisme asal Singapura, Rohan Gunaratna (berdasarkan berita dari ABC TV, Minggu, 13-11-2002).

Dampak negatif, baik materil maupun non-materil, yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa terorisme di Indonesia selama ini jelas sangatlah besar. Itulah sebabnya pemerintah tak boleh bersikap setengah hati dalam rangka memerangnya. Kelompok-kelompok terorisme di Indonesia selama ini jelas sangatlah besar. Itulah sebabnya pemerintah tak boleh bersikap setengah hati dalam rangka memerangnya. Kelompok-kelompok terorisme itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Terkait itulah maka hal yang terutama harus kita lakukan, sekali lagi, adalah mengakui bahwa gerakan terorisme agama itu memang ada di negara ini. Dengan mengakui maka kewaspadaan pun dapat dikembangkan. Karena, bisa saja para teroris itu berkeliaran di sekitar kita. Itu sebabnya, upaya-upaya proaktif pemerintah an unit khusus Polri, yakni Detasemen Khusus (Densus) 88, harus didukung.

Pertanyaannya sekarang, siapakah kelompok teroris agama itu? Upaya mengidentifikasi para pelaku teror itu jelas perlu, agar dengan demikian upaya dan sasaran dalam rangka memerangnya pun menjadi jelas dan terarah. Departemen Luar Negeri AS, pasca Bom Bali I, secara resmi telah menetapkan Jamaah Islamiyah (JI) sebagai kelompok teroris. Dengan demikian, sanksi terorisme Pemerintah AS sejak itu mulai berlaku bagi kelompok tersebut. Sanksi tersebut, antara lain, di bidang ekonomi, seperti pembekuan semua aset JI yang ada di AS, larangan mengumpulkan dana atau berbisnis bagi JI di AS, juga penolakan pemberian visa masuk ke AS bagi anggota JI (Media Indonesia, 24/10/2002).

JI sendiri, yang berbasis di Singapura dan Malaysia serta memiliki jaringan yang aktif di kawasan Asia Tenggara, merupakan organisasi ke-35 yang masuk daftar teroris asing versi Departemen Luar Negeri AS. Diduga, dua pemimpin senior JI adalah warganegara Indonesia. Menyusul sikap AS itu, sedikitnya tercatat 47 negara anggota PBB ikut mengusulkan agar JI ditetapkan PBB sebagai kelompok teroris bersama Al-Qaeda. Indonesia pun akhirnya ikut pula mengusulkan hal yang sama, berdasarkan Resolusi PBB Nomor 1267, 1333, dan 1390 tentang pemberlakuan saksi kepada organisasi teroris, sebagaimana dikatakan oleh Jurubicara Departemen Luar Negeri RI saat itu, Marty Natalegawa (*Suara Pembaruan*, 24/10/2002).

Jika seluruh anggota DK PBB menerima usul itu, maka PBB pun niscaya mengeluarkan sebuah resolusi untuk membekukan semua aset dan kegiatan finansial yang berkaitan dengan JI. Sementara itu, PBB juga diinformasikan telah mencantumkan Global Relief Foundation, kelompok amal muslim yang berbasis di Illinois, AS, sebagai teroris dan diduga telah membantu mendanai kegiatan terorisme Al-Qaeda (*Sinar Harapan*, 24/10/2002).

Cikal bakal JI berawal sejak paruh pertama dekade 1970-an di Mesir. Semula JI hanya berupa organisasi kecil yang bergerak di kampus-kampus. Sebelum resmi menyandang nama Jamaah Islamiyah, organisasi ini bergerak dengan nama Lajnah Diniyah (komite Agama) yang terfokus pada kegiatan konvensional kemahasiswaan, seperti kegiatan sosial, budaya, olahraga, seminar, piknik, dan

perkembangan. Ciri pergerakan “embrio” JI adalah keteguhannya pada ajaran-ajaran dan pemahaman keagamaan yang sangat salafy, alias tradisional. Hingga medio 70-an, buletin-buletin dan media JI banyak menyorot masalah akhlak, etika umum, serta mengkritik sistem pendidikan *co-education* (pembinaan pria dan wanita) dalam perguruan tinggi di Mesir.²⁴

Iklim politik di Mesir pascaperang Arab-Israel (Perang Yom Kippur, Oktober 1973), menggoda JI untuk merambah ranah politik. Gelagat itu dibaca dengan baik oleh Al-Ikhwan Al-Mualimin, gerakan sosial dan dakwah yang beralih menjadi gerakan politik garis keras. Karena mengusung ideologi yang sama, lalu terjadilah “koalisi” antara JI dan Ikhwan. Koalisi ini bahu-membahu melancarkan kampanye menolak perundingan damai antara Mesir dan Israel. Tahun 1976, secara sepihak JI mengambil langkah konfrontatif dengan rezim menyusul makin seriusnya perundingan damai.

Namun, pada 1979, JI mulai terusik oleh hegemoni Ikhwan di dalam tubuh koalisi. Akhirnya, JI menarik diri dari koalisi, lalu bekerja sama dengan gerakan Al-Jihad, sebuah gerakan Islam radikal yang sudah “menguasai” kampus-kampus di wilayah Mesir Selatan. Sejak itu JI dan Al-Jihad sering melancarkan aksi penyerangan terhadap acara-acara pesta yang digelar di kampus. Di luar kampus, aktivitas JI gencar mengkampanyekan pembasmian tempat-tempat hiburan serta semua hal yang dinilai tidak sesuai dengan norma-norma agama. Lebih jauh, JI mengobarkan semangat permusuhan terhadap mahasiswa Kristen. Akibatnya, sejumlah gereja di Mesir Selatan menjadi korban kampanye JI. Sejak itulah, JI mulai berhadapan dengan aparat keamanan. Rezim pun mulai menguasai dan membatasi aktivitas mereka (Saleh al-Wirdhani:1992).

Memasuki dekade 80-an, konfrontasi JI versus rezim kian meruncing. Pasalnya, JI menolak Perjanjian Camp David (perjanjian damai antara Mesir dan Israel 1979) serta tidak mengakui eksistensi negara Yahudi tersebut. Selain itu, JI menuntut formalisasi Syariat Islam dan gerakan taghyir al-munkar, alias pembasmian kemungkaran dengan segala cara. Intinya, JI menuntut pembentukan negara Islam di Mesir khususnya dan seluruh negeri berpenduduk mayoritas muslim pada umumnya. Klimaks dari konfrontasi itu terjadi pada Oktober 1981, yang ditandai dengan pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat oleh kelompok Islam radikal.

Buntut dari Tragedi Oktober itu, Presiden Mubarak (penerus Sadat) mengumumkan perang terhadap JI dan semua organisasi/gerakan radikal. Banyak *think-tank* dan aktivitas JI diringkus. JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Pada masa sulit ini, petinggi dan aktivis JI kabur ke luar negeri yang lebih memberi keleluasaan. Di saat krisis itulah cendekiawan tunanetra Dr. Omar Abdurrahman terpilih mengomandani JI. Ia pun ditahbiskan sebagai Amir (pemimpin tertinggi) sekaligus mufti Jamaah.

Pelan tapi pasti, Omar berhasil mereorganisasi JI. Bahkan di bawah kepemimpinan tokoh tunanetra inilah JI tampil lebih sistematis, solid dan terarah, walau terpaksa harus bergerak secara klandestin. Salah satu prestasi Omar adalah keberhasilannya memaparkan pokok-pokok pikiran dan perjuangan JI secara rinci dalam sebuah majalah berjudul “Al-Jama’ah Al-Islamiyah”, yang intinya antara lain: takfir (pengafiran) penguasa yang tidak menjalankan Syariat Islam; kewajiban memerangi kelompok/golongan yang tidak melaksanakan Syariat Islam, pembasmian kemungkaran dengan segala

²⁴ Penjelasan tentang JI ini dikutip dari artikel Imam Chairie, “Sekilas tentang Jamaah Islamiyah” dalam *Media Indonesia*, 31 Oktober 2002.

cara, termasuk kekerasan; larangan memasuki ranah politik formal seperti partai, parlemen, atau kabinet; dan takaful (kewajiban bekerja sama antarsesama anggota JI).

Pada era Omar, tercatat JI berhasil “mengatasi” sejumlah tokoh yang dinilai potensial menghalangi cita-cita JI. Di antara korbannya adalah Menteri Wakaf Dr Rif’at al-Mahjub, Mendagri Zaki Badar, serta Profesor Farah Foudah, pemikir berhaluan kiri. Sementara Omar sendiri, sejak 1994, ditahan pemerintah AS karena diduga berada dibalik peledakan gedung WTC di Oklahoma, AS.

Paruh kedua dekade 80-an, gerakan Islam radikal bermunculan di banyak negara Islam. Namun, mereka mendapatkan perlawanan sengit dan represif dari rezim setempat. Melihat kondisi yang tak menguntungkan itu, petinggi organisasi radikal memondahkan aktivitasnya ke Afghanistan. Kala itu, Afghanistan sedang melakukan jihad melawan agresi Tentara Merah Uni Sovyet. Apalagi, para pemimpin negara-negara Timur Tengah sangat getol mendukung jihad Afghanistan. Tak jarang, banyak rezim yang merestui dan memfasilitasi kepergian warganya ke Afghanistan. Bahkan ada pula yang turut mendukung pendanaan jihad. Menurut perhitungan rezim-rezim Timur Tengah, para aktivis organisasi radikal akan lebih pas bila berjuang melawan tentara komunis, ketimbang merecoki suasana dalam negeri. Dalam kajian Halah Moustofa, cendekiawan politik asal Mesir, AS dan sekutu Barat berada di balik pasukan Mujahidin Afghanistan sebagai upaya meredam laju ekspansi pengaruh Uni Sovyet ke wilayah Asia Selatan. Maka, jadilah Afghanistan muara pertemuan semua organisasi radikal itu. Saat itu Kabul tak ubahnya kawah candradimuka tempat penggodokan kader-kader Islam radikal.

Tak terkecuali Indonesia. Meski tak ada dukungan formal dari rezim, ternyata banyak juga warga negara Indonesia, baik secara individual maupun disponsori oleh organisasi, yang berangkat ke Afghanistan untuk bergabung dengan para mujahidin. Di luar perkiraan, para pejuang mujahidin Afghanistan yang terdiri dari berbagai bangsa itu, pascapenarikan mundur tentara Sovyet, menjadi bumerang bagi pemerintah masing-masing. Sekembalinya ke negara asal, mereka mengobarkan semangat perang kepada semua rezim “sekuler”. Di sana-sini kerap terjadi bentrokan antara pemerintah dan Al-Afghan Al-Arab (julukan orang-orang Arab veteran perang Afghanistan).

Di wilayah Asia Tenggara, veteran perang Afghanistan belum *show of force*, karena terbentur oleh kekuatan rezim. Tetapi secara diam-diam, mereka membentuk sel-sel jaringan di kawasan Asia Tenggara. Jaringan tersebut banyak beredar di Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Pada awalnya mereka menjadikan Malaysia sebagai tempat transit sekaligus berlindung. Hal itu dimungkinkan mengingat Kuala Lumpur saat itu secong gencar-gencarnya berkampanye Islamisasi dan rezim sendiri sangat welcome kepada para cendekiawan dan aktivis Islam dari banyak negara. Sementara di saat yang sama, negara-negara Asia Tenggara lainnya menerapkan kebijakan kurang bersahabat dengan para aktivis Islam.

Menyusul terpinggirnnya Soeharto dari pentas politik nasional, 21 Mei 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan. Kerusuhan dan suasana *chaostic* meletup di semua wilayah Nusantara. Rasa keamanan dan kenyamanan sirna, anarkisme merajalela sebagai akibat dari runtuhnya wibawa rezim dan sistem bernegara-berbangsa. Keadaan seperti ini membuka pintu bagi organisasi radikal untuk melakukan penetrasi ke wilayah RI. Apalagi kemesraan antara Kuala Lumpur dan kelompok Islam radikal mulai luntur. Di dukung oleh struktur geografis yang terdiri dari ribuan pulau, mental bobrok aparat yang rawan suap, krisis ekonomi, dan konflik horizontal yang meluas, Indonesia bagaikan “surga” bagi aneka

organisasi radikal itu. Ledakan di Legian, Kuta, 12 Oktober 2002, merupakan bukti bahwa jaringan terorisme global memang ada di Indonesia.

Terkait Bom Bali I yang menghebohkan itu, aparat maupun intelijen asing segera menduga (menuduh?) Abu Bakar Ba'asyir berada di balik peristiwa pengeboman itu. Dugaan itu bersumber dari informasi Omar Al-Farouq, tersangka teroris yang mengaku agen Al-Qaeda dan kini ditahan di AS. Selain menyebut-nyebut nama Ba'asyir, ia juga mengatakan bahwa pembelian bahan-bahan peledak untuk kepentingan pengeboman di Bali itu melibatkan sejumlah oknum TNI (*Sinar Harapan*, 24/10/2002). Menurut Al-Farouq, yang dikutip oleh Sunday Times edisi Minggu 20 Oktober 2002, Osama bin Laden melalui ajudannya dilaporkan mengirimkan dana kepada Ba'asyir sebesar 48.000 poundsterling atau 133.440 dolar AS. Dana tersebut dikirim atas nama Sheiks Abu Abdullah Emirati, nama samaran bin Laden (*Sinar Harapan*, 21/10/2002).

Abu Bakar Ba'asyir sendiri, yang diduga menjadi dalang serangkaian Bom Malam Natal 2000, bukanlah nama baru dalam daftar "orang-orang yang harus diwaspadai" di Indonesia. Pada 1980-an, ia bersama Abdullah Sungkar muncul dalam pengadilan tindak pidana subversif karena menolak asas tunggal Pancasila. Menurut Sidney Jones dalam laporan International Crisis Group (ICG) 8 Agustus 2002, Ba'asyir dan Sungkar memiliki persamaan latar belakang: keduanya keturunan Yaman (*Sinar Harapan*, 24/10/2002). Sungkar lahir dari keluarga pedagang batik terkenal keturunan Yaman (Hadramaut) di Solo, Jawa Tengah, tahun 1937. Sedangkan Ba'asyir lahir di Jombang, Jawa Timur, tahun 1938. Medio 50-an keduanya menjadi pemimpin Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang erat dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Pada 1963, setelah dua tahun di Pondok Pesantren Gontor, Ba'asyir hijrah ke Solo, tempat ia bertemu Sungkar. Saat itu Sungkar aktif di Masyumi, sementara Ba'asyir di organisasi Al-Irsyad. Pada 1967, keduanya bersama Hasan Basri mendirikan radio Dakwah Islamiyah Surakarta.

Empat tahun kemudian, 1971, mereka mendirikan Pondok Pesantren Al-Mukmin di Solo. Pada 1973, pondok pesantren itu dipindahkan ke Ngruki. Pada 1975, stasiun radio mereka ditutup oleh aparat karena dinilai antipemerintah. Dua tahun kemudian Sungkar ditahan selama enam minggu karena tak ikut Pemilu 1977. Menurut Widjiono Wasis dalam buku "Geger Talangsari", seperti dikutip *Sinar Harapan* (24/10/2002), Sungkar merupakan salah satu faksi Darul Islam (DI) yang bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Namun, keterangan tersebut dibantah oleh Sidney Jones, meski ia mengakui bahwa mereka bersimpati kepada cita-cita tersebut, Jones menjelaskan bahwa keduanya pernah ditangkap, tahun 1978, dalam kaitan pertemuan dengan Haji Ismail Pranoto (Hispran), pemimpin Komando Jihad. Dalam persidangan tahun 1982, pemerintah secara eksplisit menyebut kaitan antara Komando Jihad dengan JI.

Nama JI ini sebenarnya merujuk pada organisasi baru orang-orang DI. Namun, dalam kenyataannya, aparat hukum mengalami kesulitan untuk membuktikan JI sebagai sebuah organisasi dengan pemimpin yang dapat diidentifikasi. Menurut Jones, "Pada kenyataannya JI adalah istilah generik yang dapat merujuk pada suatu komunitas Islami". Jadi, JI dipandang sebagai prakondisi menuju NII. Sementara menurut berita pagi radio El-Shinta (29/20/1002), oleh Dinas Intelijen Filipina dilaporkan bahwa JI memiliki cita-cita membangun sebuah negara Islam yang mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, bahkan sampai ke bagian utara Australia.

Kembali pada Sungkar dan Ba'asyir, keduanya sempat kembali ke Ngruki dua tahun, sebelum Mahkamah Agung tahun 1985 menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara. Tapi, mereka melarikan

diri dan menetap di Malaysia antara tahun 1985-1998. Setelah Soeharto berhasil dipinggirkan dari pentas politik nasional, barulah keduanya kembali ke Indonesia. Namun, pada 2000, Sungkar meninggal dunia. Sedangkan Ba'asyir menjadi Ketua Dewan Syuro Majelis Mujahidin Indonesia (sejak 2008 ia keluar dari organisasi ini).

Selain Ba'asyir, warga Indonesia lainnya yang juga diduga terlibat dalam aksi-aksi pengeboman di dalam negeri adalah Hambali alias Nurjaman alias Riduan Isamuddin. Menurut Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan Tim Mabes Polri yang dikirim ke Malaysia, Hambali adalah Pemimpin Tertinggi Majelis Mujahidin Malaysia. Posisi tersebut setara dengan wakil Ba'asyir. Hambali, menurut pihak keamanan Filipina, pernah terlibat dalam serangkaian latihan aksi-aksi terorisme di Filipina bersama dengan Muklis Yono (Pemimpin *Special Operation Group/SOG* dalam Divisi Ketiga Kekuatan Bersenjata Islamik Bangsa Moro/BIAF, bagian dari gerakan separatis Muslim yang tergabung dalam Front Pembebasan Islam Moro/MILF) dan Faturrahman Al-Ghozi (yang kini mendekam di penjara Filipina karena mendalangi serangkaian pengeboman di Metro Manila, 30 Desember 2000 dengan korban tewas lebih dari 30 orang).

Hambali, oleh dua anggota JI yang tertangkap di Singapura, diakui sebagai orang yang menyuruh melakukan peledakan bom di Batam dan Pekanbaru beberapa tahun silam. Ia diduga memiliki kaki-tangan yang banyak di Indonesia. Salah satunya adalah Imam Samudra, seorang insinyur yang ahli merakit bom (yang sudah dieksekusi mati, 2009). Menurut sebuah dokumen rahasia FBI, operator Al-Qaeda bernama Mohammed Mansour Jabarah (yang tertangkap di Oman pada Maret 2002) mengaku mengetahui semua rencana pengeboman Al-Qaeda ke Kedutaan Besar AS di Singapura dan Filipina. Jabarah juga mengaku bekerja sama dengan Omar Al-Farouq sebagai operator Al-Qaeda. Jabarah berkisah, Hambali telah lama mengutarakan niatnya untuk meletakkan bom di beberapa bar, klub malam, dan kafe yang sering dikunjungi orang barat di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia (*Suara Pembaruan*, 24/10/2002).

Akan halnya yang berkaitan dengan aksi pengeboman di Zamboanga, Filipina, tak lama setelah Bom Bali I, aparat keamanan Filipina menduga sedikitnya terdapat dua warganegara Indonesia yang terlibat dalam aksi teroris tersebut. Kedua orang itu, yang belum disebutkan namanya, diduga juga merupakan anggota SOG (*Sinar Harapan*, 24/10/2002). Hambali sendiri, menurut informasi intelijen AS, kini tercatat sebagai salah satu dari enam pejabat baru dalam Al-Qaeda. Para pejabat baru itu, menurut laporan tersebut, akan memimpin militer Al-Qaeda dan jaringan finansialnya, seperti mengelola sebuah tim yang tiap anggotanya memiliki tugas khusus. Misalnya, Hambali adalah sebagai direktur regional kelompok itu dan bertanggungjawab atas aksi teror di Asia Tenggara. Sedangkan dua anggota kunci Al-Qaeda lainnya adalah pengawas keuangan Abdullah Ahmed Abdullah, Komandan militer Saif Al-Adel, dan pelatih dan koordinator terorisme Abu Musab Zarqawi, Tawfiq Atash dan Rahim Al-Nashri. Menurut sumber intelijen Indonesia kepada *The Straits Times*: "Jelas sudah Hambali adalah mata-mata senior di Asia Tenggara yang memiliki jaringan teroris dengan Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (*Suara Pembaruan*, 31/10/2002).

Akan halnya *Washington Post* memberitakan bahwa kelompok baru itu sudah bekerja sejak beberapa tahun lalu. Beberapa pejabat baru itu pernah melatih milisi asal Somalia yang membunuh 18 anggota *Rangers* Angkatan Darat AS di Mogadishu pada Oktober 1993. Selain itu mereka juga

merencanakan pengeboman Kedutaan AS di Tanzania dan Kenya, termasuk pengeboman kapal perang AS USS Cole bulan Oktober 2000 di Yaman.

Kepemimpinan Al-Qaeda sebelum 11 September 2001 memang terpusat pada sebuah dewan syuro yang merencanakan dan membuat keputusan penting di bidang keuangan. Namun, sekarang, kepemimpinan baru itu tak melaksanakan tugas secara terpusat, karena mereka justru akan ditempatkan di berbagai wilayah di Afganistan, Pakistan, Semenanjung Arab, dan Asia Tenggara. Pola baru inilah yang membuat kelompok itu semakin berbahaya, sebab mereka tak memerlukan pengawasan dan komando terpusat.

Sedangkan Ayman Zawahari, pembantu terlama Osama bin Laden, masih bertugas sebagai wakil komandan jaringan itu. Seorang pejabat AS mengatakan, bin Laden menyarankan kepada anak buahnya untuk mengumpulkan dana sendiri dan melakukan serangan secara sendiri-sendiri. Untuk melakukan itu tak diperlukan lagi izin dari markas besar jaringan itu.

Selain beberapa nama di atas, yang merupakan warga Indonesia, ternyata masih ada lagi seorang lainnya yang juga diduga teroris. Bernama Parlindungan Siregar, buronan Pemerintah Spanyol ini dituduh pernah mengirim ribuan milisi ke Indonesia untuk dilatih di kamp pelatihan Al-Queda di negeri ini. Insinyur penerbangan yang merupakan salah seorang pemimpin di kamp pelatihan itu dituduh menjadi tangan kanan Imad Eddin Barakat Yarkas, warga Suriah yang menjadi orang kepercayaan Osama bin Laden dan pemimpin sel Al-Queda di Spanyol. Pemerintah Spanyol sendiri setahun silam sudah memperingati Pemerintah RI tentang jaringan Al-Queda yang memiliki sel-sel dan kamp pelatihan di Indonesia. Namun menurut mereka, Pemerintah Indonesia mengabaikannya (*Suara Pembaruan*, 21/10/2002).

Jika sebelumnya diduga hanya nama-nama itu saja yang merupakan teroris orang Indonesia, ternyata perkembangan hasil investigasi Tim Mabes Polri menemukan nama-nama lain yang juga warga negara Indonesia dan diduga terkait dengan Bom Bali I. seperti dikethui, Amrozi dkk. akhirnya telah dieksekusi mati sebagai terpidana teroris dalam peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002. Ia tercatat sebagai alumnus Pondok Pesantren Al-Islam di Desa Tengulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur. Ia mengaku kenal dan bahkan pernah menjadi murid Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Amrozi, Ba'asyir pernah beberapa kali diundang berceramah ke Ponpes Al-Islam. Amrozi alias Chairul Anam, yang mengaku aksinya didukung oleh bantuan dana dari Imam Samudra (*Sinar Harapan*, 11/11/2002), pernah berada di Afganistan selama kurang-lebih tiga tahun (1991-1994). Selama periode itu, ia beberapa kali muncul di Malaysia dan Indonesia. Menurut sumber intelijen, pria yang punya nama samaran Zaid (di Afganistan) dan Zulkarnaen (di Malaysia) sama seperti Hambali dalam keahliannya merakit bom. Menurut kalangan intelijen, kesulitan utama melacak jaringan mereka yang eks Aghanistan itu adalah karena kerapnya mereka berganti nama dan identitas. Mobilitas mereka juga sangat tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Mereka membangun sel-sel tertutup, yang hanya terdiri dari beberapa orang saja. Sel yang satu tak berhubungan dengan sel yang lainnya (*Kompas*, 11/11/2002).

Amrozi mengaku bahwa dirinya kurang puas dengan aksinya pada 12 Oktober 2002 itu. Karena, sebenarnya ia dan kawan-kawannya merencanakan bom yang besar diledakkan di Kantor Konsulat Jenderal AS di Kawasan Renon, Bali. Tapi, oleh salah satu kawanan itu justru ditempatkan di mobil yang diledakkan di depan Sari Club di Legian. Sehingga, lebih banyak warga Australia yang ketika itu memadati Sari Club dan Cafe Paddy's yang menjadi korban.

Ketua Tim Investigasi yang juga Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabel Polri saat itu, Irjen (Pol) Drs Made Mangku Pastika, mengungkapkan bahwa Amrozy menyebutkan dirinya kurang bahagia atas perbuatannya itu. Dia sebenarnya menghendaki orang Amerika yang harus banyak meninggal, tapi kenyataannya yang menjadi korban paling banyak warga Australia. Dia membenci warga Amerika, karena dianggap menghancurkan masyarakat Islam di Afghanistan dan sikapnya tidak *fair* dalam menghadapi konflik Israel-Palestina. Kebencian inilah yang membuat tersangka bersama kawannya meledakkan bom di Bali. “Kami ingin membunuh warga Amerika dalam jumlah banyak,” tutur Amrozi seperti dikutip Pastika (*Suara Pembaruan*, 12/11/2002).

Selain memusuhi AS dan Barat, adakah motivasi lain yang dimiliki kaum teroris agama di Indonesia? Tak lama setelah peristiwa Bom Bali I, mantan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew mengatakan bahwa di Indonesia ada sekitar 100 kelompok yang sama radikalnya dengan jaringan pengebom Bali tersebut.²⁵ Kelompok radikal itu, menurut Lee, punya ilusi membangun sebuah kekhalifahan regional Asia Tenggara yang meliputi setidaknya Indonesia, Malaysia, dan Filipina Selatan.

Jika sinyalemen Lee benar, mungkin itulah mimpi membangun Negara Islam Nusantara (NII) atau yang disebut juga Daulah Islamiyah Raya, yang selama ini tertanam di benak kelompok-kelompok radikal agama di Indonesia selama ini. Untuk itu kita harus menyadarkan mereka, bahwa mimpi membangun negara teokrasi di atas negara kesatuan yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika ini hanyalah kesia-siaan. Dulu, di zaman revolusi, ada Kartosuwirjo, yang selama 13 tahun berjuang untuk mendirikan NII demi terciptanya Darul Islam (DI) – sebuah dunia baru masyarakat Islam, di mana kaum muslimin dan muslimat dapat menjalankan hukum Islam secara menyeluruh. Namun akhirnya, mimpi tersebut kandas karena mendapat tentangan dari pemerintah RI dan TNI. Kartosuwirjo sendiri akhirnya tertangkap, diajukan ke Sidang Mahkamah Angkatan Darat, 16 Agustus 1962, dan dituntut hukuman mati karena didakwa bersalah atas kegiatan makar untuk merobohkan Negara RI dan makar untuk membunuh Kepala Negara. Pada 5 September 1962, Kartosuwirjo menemui ajalnya di hadapan regu penembak dari keempat angkatan.²⁶

Upaya Memerangi Terorisme Agama

Gerakan terorisme agama, baik para pelaku dan jejaringnya, juga ideologinya, jelas harus diperangi. Sebab selain ia bertentangan dengan agama yang sejati, kerugian yang ditimbulkannya secara material sangatlah luas. Citra Indonesia pun bertambah rusak karena aksi-aksi terorisme yang tak kunjung reda itu.²⁷ Berdasarkan itu maka kita perlu bertanya: ke depan, apa yang harus kita lakukan untuk memeranginya?

Ted Robert Gurr dalam *The Foundation of Modern Terrorism* (1997), seperti dikutip Budi Gunawan (*Suara Pembaruan*, 23/9/2009), menegaskan bahwa penanggulangan terorisme tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Gurr juga mengingatkan, lembaga negara dan pemerintah tidak akan pernah memadai untuk melawan terorisme. Karena itulah elemen-elemen masyarakat sipil dan lembaga-lembaga keagamaan penting dilibatkan dalam perang melawan terorisme, terutama dalam mengamputasi nalar

²⁵ Lihat wawancara dengan Lee Kuan Yew di majalah *Far Eastern Economic Review* edisi terakhir Desember 2002.

²⁶ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo, Angan-angan yang Gagal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

²⁷ Dikatakan “bertambah rusak”, karena dalah hal indeks korupsi, dari tahun ke tahun Indonesia selalu masuk ketogori 5 besar negara terkorup di dunia.

terorisme. Otoritas keagamaan harus memainkan peran yang lebih signifikan dalam upaya deradikalisasi ini.

Terkait itu semua umat beragama harus disadarkan bahwa agama tidaklah boleh ditafsirkan menurut keinginan atau kepentingan sendiri yang sempit dan picik, apalagi jika berorientasi kekerasan. Semua orang harus dicelikkan bahwa teroris (agama) telah keliru dalam menafsirkan doktrin agama; mereka bukanlah pahlawan kaum miskin atau pejuang ketidakadilan. Mereka adalah penjahat, perbuatan mereka adalah sebetulnya kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat mengerikan. Jika teroris mati karena aksi terorismenya, mereka jangan sekali-kali dipandang sebagai syuhada – orang yang mati karena pengorbanan dan perjuangannya untuk agama.²⁸

Dewasa ini, terorisme bahkan telah dianggap sebagai kejahatan transnasional, karena jejaring para pelakunya yang tersebar di berbagai negara. Tak heran jika banyak negara kini menyikapinya secara ekstra-waspada dan ekstra-tegas, meski untuk itu mereka kerap melakukan pelanggaran HAM. Di beberapa negara, teroris bahkan dianggap sebagai “*the most dangerous*” sehingga upaya menangkapnya bahkan diiming-imingi dengan uang yang jumlahnya besar.

Di sisi lain, khususnya bagi umat Islam, haruslah diingat dan dicamkan betul bahwa upaya memerangi teroris dan terorisme ini bukanlah merupakan kebencian terhadap atau keinginan memerangi Islam. Dan bagi kita pada umumnya, hendaknya disadari bahwa teroris dan terorisme harus diperangi karena kelompok ini beserta ideologinya berpotensi mengancam demokrasi, HAM, stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran yang didambakan semua orang di dunia. Karena itulah maka setiap orang mestinya menambahi dan menyeimbangkan imannya dengan rasio, sehingga tak mudah terbakar luapan emosi dan fanatisme sempit seperti yang kerap terjadi pada sebagian masyarakat. Dengan upaya itulah kita niscaya tak mudah mengafirkan orang lain yang tak sekeyakinan dan atau seajaran dengan kita.

Sedangkan di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain yang pluralistik, semestinya pula kita belajar membiasakan diri untuk menyimpan identitas keagamaan maupun identitas-identitas primordial lainnya, untuk kemudian mengedepankan identitas nasional atau universal berdasarkan kemanusiaan. Selain mengembangkan kritisisme beragama, kita juga harus berupaya untuk menjadikan agama kita sebagai “*rahmatan lil alamin*” – yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam kaitan itulah maka kita harus memandang pluralitas di tengah kehidupan bermasyarakat sebagai rahmat dan nikmat ilahi; memandang “yang lain” sebagai karib untuk bekerjasama.

Upaya melibatkan elemen-elemen masyarakat sipil juga harus dipandang penting sebagai strategi preemtif dan preventif. Sebaliknya penempatan aparat keamanan lebih dimaksudkan sebagai ujung tombak di ranah represif atau penindakan. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, terorisme agama haruslah dijadikan musuh bersama (*common enemy*). Dengan kesadaran seperti itu kiranya tak satu pun pihak yang menyikapi teroris sebagai pahlawan.²⁹ Pertanyaannya, bersediakah kita tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap wacana-wacana maupun aspirasi-aspirasi agama yang mendukung kekerasan dan para pelakunya? Bayangkan, di negeri yang religius ini, jenazah Amrozi dkk, disambut bak pahlawan oleh warga sekampungnya. Bahkan sementara dalam pelarian karena dikejar-

²⁸ Hasibullah Satrawi, “Mencabut Akar Terorisme, *Sinar Harapan*, 10/8/2009

²⁹ Seperti yang diperlihatkan sekelompok warga sipil ketika menyambut jenazah teroris Bom Bali I Imam Samudra (November 2008), juga terhadap Air Setiawan yang tertembak mati Densus 88 di Temanggung (Agustus 2009).

kejar polisi, Noordin M. Top masih sempat-sempatnya menikah dengan beberapa perempuan dan punya anak pula. Pertengahan Juni 2007, ketika polisi berhasil menangkap Abu Dujana dan Zarkasih, yang diduga kuat terlibat jaringan teroris, Tim Pembela Muslim (TPM) justru mendesak Polri untuk mencabut stigma Abu Dujana adalah teroris. Saat yang bersamaan banyak pihak, termasuk di DPR, malah memprotes polisi karena menmbak kaki Abu Dujana di hadapan anak-anaknya yang masih kecil. Apakah polisi harus bersikap lembut-santun terhadap seorang yang disangka kuat sebagai teroris kakap dan telah diintai siang-malam dengan kesiagaan penuh? Apakah polisi harus menghalau anak-anak itu dulu sebelum meringkus seorang panglima militer kelompok teroris?

Benarlah apa yang dikatakan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwino tak lama setelah Abu Dujana dilumpuhkan: bahwa kita tak mungkin berdo'a saja dalam upaya meringkus dpara teroris yang gemar menebar ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia. Jadi, jika memang beralasan, kekerasan yang dilakukan polisi tidaklah dengan serta-merta dapat dianggap salah. Apalagi polisi sejatinya memang alat negara di bidang keamanan yang sah untuk melakukan cara-cara koersif terkait tugasnya.

Seperti telah disinggung di atas, wacana-wacana dan aspirasi-aspirasi yang cenderung pro-kekerasan masih kerap diberi ruang di sini. Tak heran jika kelompok-kelompok teroris merasa “diberi angin” di negeri ini. Inilah persoalannya. Seperti yang dikatakan Wakil Menlu AS Jim Steinberg, tidak mungkin Indonesia dapat memerangi terorisme seratus persen jika sebagian umat beragama masih memberi ruang gerak bagi ideologi dan aksi-aksi yang pro-kekerasan.

Tak pelak, agama dan keberagaman kita harus dikembangkan terus-menerus dengan memberinya nalar yang cukup. Agama dan keberagaman tidak boleh menjadi kekuatan pemaksa ketaatan dan pengklaim kebenaran tunggal di masyarakat. Apalagi di era demokratisasi yang bergulir deras ini, agama dan keberagaman tidak boleh diizinkan masuk ke ruang publik dan “merusak” nilai-nilai demokrasi yang mulai dihayati masyarakat dewasa ini, yakni kemajemukan dan toleransi.

Menurut filsuf politik John Rawls (1993), agama bahkan harus dikeluarkan dari wacana politik di ruang-ruang publik. Sebab, nalar agama yang cenderung kaku dan beku sangat mungkin menghancurkan keanekaragaman ide-ide di ranah politik. Agama, menurut hematnya, mestilah ditertibkan ke ruang privat saja, dan tidak perlu serta tidak boleh dipakai sebagai instrument penalaran public. Warga masyarakat harus memakai argumen sekuler-rasional, dan obyektif, terutama jika menyangkut kebijakan publik.

Untuk itu, tak pelak, diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat masyarakat. Terkait itulah jalur pendidikan harus dimanfaatkan dalam rangka menyemai pikiran-pikiran kritis di dalam agama dan keberagaman masyarakat. Selain itu bangunan masyarakat sipil juga harus diperkuat, agar baik komunitasnya maupun jejaringnya di aras lokal maupun nasional dapat menjadi benteng pertahanan yang andal dalam rangka memerangi terorisme.

Kedua, alih-alih berwacana apalagi berdebat, lebih baiklah seluruh komponen bangsa segera merapatkan barisan dan menyusun langkah-langkah taktis-strategis demi memeranginya. Terkait itu, bagaimanakan kita harus menyikapi “gagasan” Presiden Yudhoyono yang ingin melibatkan TNI dalam memerangi terorisme? Menurut dia, keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme adalah amanah UU. “Negara lain juga melibatkan semua komponen ketika negaranya diancam kejahatan terorisme. Itulah negara demokrasi, yang pelaksanaan demokrasinya sudah ratusan tahun lebih dulu dibandingkan

kita. Ini tigas sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 (tentang TNI)”, kata Yudhoyono di Markas Komando Pasuka Khusus TNI AD, Cijantung, Jakarta (*Kompas*, 21/8/2009).³⁰

Menurut anggota Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi, Agus Widjojo, Presiden dan TNI perlu menaati aturan agar pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tak melenceng dari aturan. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus didahului putusan politik dari Presiden. Namun, menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, ada atau tidaknya putusan politik untuk pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme merupakan perdebatan legal formal yang tidak perlu (*Kompas*, 23/8/2009). Menurut dia, Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyebutkan, “... tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”. Dalam Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan, penanganan terorisme sebagai salah satu tugas operasi militer selain perang (OMSP) TNI. Militer dapat ikut dilibatkan karena terorisme adalah kejahatan luar biasa, yang juga membahayakan keutuhan negara. “Akan tetapi, hal itu dilakukan tetap dengan mengedepankan peran Polri”, ujar Juwono.

Sementara, gurubesar hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji berpendapat, dalam kondisi mendesak, Presiden bisa mengeluarkan kebijakan untuk melibatkan TNI dalam menangani terorisme. “Kebijakan ini bisa disampaikan secara lisan dan tidak harus lewat peratran tertulis, seperti keputusan presiden. Setelah kondisi aman, Presiden secara lisan bisa meminta pelibatan diakhiri. Hal itu juga terjadi di Amerika Serikat setelah peristiwa 11 September 2001”, jelasnya. Indriyanto khawatir, jika pelibatan TNI didahului dengan peraturan tertulis, kebijakan itu bisa menjadi permanen dan akhirnya menimbulkan masalah. Sebab di Indonesia, keputusan yang tertulis biasanya sulit ditarik lagi. Jadi meski lisan, harap Indriyanto, kebijakan presiden tetap harus jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan antara TNI dan Polri. Selain mempertimbangkan pelibatan TNI, yang dibutuhkan dalam penanganan terorisme adalah memperluas wewenang polisi dalam tindakan pencegahan. “Sekarang polisi tidak memiliki payung hukum untuk menindak kelompok tertentu yang melakukan latihan semimiliter. Padahal, kegiatan itu mungkin awal dari terorisme,” ujarnya.

Sedangkan gurubesar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Achmad Ali, mengingatkan, terorisme adalah kejahatan internasional. Meski pelakunya dari dalam negeri, dana dan otaknya berasal dari luar negeri. Tugas TNI-lah untuk menghadapi ancaman dari luar itu. Bahkan, seluruh warga harus membantu Polri menghadapi ancaman terorisme. Achmad Ali mengingatkan, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme terkait dengan tugas menjaga keselamatan dan kehormatan bangsa. Apalagi, terorisme bisa merusak perekonomian suatu bangsa.

Sebenarnya pertimbangan untuk melibatkan TNI dibuat, antara lain karena: 1) TNI punya struktur teritorial hingga tingkat Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan pada masa lalu aparat teritorial ini menjadi ujung tombak ABRI dalam operasi intelijen; 2) TNI punya kemampuan menumpas aksi terorisme melalui unit-unit khususnya seperti Detasemen 81 Kopassus (TNI AD), Detasemen Jala Mengkara (TNI AL), Detasemen Bravo (TNI AU); 3) upaya melawan teror tidak bisa semata-mata diserahkan kepada Polri

³⁰ Di India, misalnya, pasukan komando dikerahkan untuk melumpuhkan teroris yang menguasai Hotel Taj Mahal di Mumbai dan menewaskan ratusan orang pada akhir 2008 lalu. Begitu pula pasukan khusus Spetsnaz Rusia dilibatkan untuk menghentikan aksi terorisme di sebuah sekolah di Besian yang menewaskan ratusan siswa, tahun 2004.

(Detasemen 88 atau unit-unit resersenyanya), karena kemampuan Polri di bidang ini tidak memadai (*Sinar Harapan*, 25/9/2009).

Sebuah pertanyaan mencuat: bagaimana kalau TNI kembali masuk ke ranah sipil (apalagi bila itu urusan penegakan hukum), padahal belum ada aturan hukum yang menjamin bahwa pelibatan TNI ini tidak akan mengulang praktik-praktik represif dan melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan ABRI pada masa rezim Orde Baru. Selama ini yang menjadi acuan untuk melibatkan unsure-unsur militer itu adalah UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada Pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan di pasal 7 ayat 2 dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud, yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Termasuk dalam operasi militer selain perang adalah upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Jadi, itulah dasarnya TNI boleh terlibat dalam operasi menumpas jaringan teroris itu. Presiden pun, atas persetujuan DPR, dapat mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi teroris yang berkaitan dengan pelibatan TNI.

Yang belum tersedia adalah peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2004, untuk menjabarkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh TNI, termasuk mengatur hubungan kerja TNI dengan Polri. Pengaturan ini sangat diperlukan, karena pada akhirnya upaya memerangi terorisme ini berujung pada kegiatan penegakan hukum (projustisia) yang acuannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidanan (KUHP) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Di kedua kitab itu jelas diatur bahwa fungsi dan tugas penyidikan itu berada di tangan Polri.

Sedangkan dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme juga ditegaskan bahwa menumpas terorisme merupakan kegiatan penegakan hukum, dan itu adalah kewenangan Polri, bukan TNI. Namun, Polri boleh meminta bantuan TNI bila diperlukan. Jadi, selama Polri tidak meminta bantuan, TNI tetap tidak bisa bergerak. Karenanya, salah satu usul yang muncul adalah TNI tidak usah terlibat dalam penangkapan, pengawasan maupun pengintaian terhadap penduduk sipil (yang merupakan tugas Polri), sedangkan porsi TNI adalah bertindak bila terjadi kegentingan. Ketiadaan aturan main ini mengharuskan pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan untuk UU No. 34/2004 tentang TNI khususnya pada pasal 7 maupun UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Kalau pun harus segera bertindak, bisa saja memberikan kepada aparat TNI itu status seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), atau setara polsus (polisi khusus) dan petugas banpol (bantuan polisi), atau mengajak anggota Polri jika unsur-unsur TNI akan melancarkan operasi, karena sekalipun yang diajak hanya berpangkat brigadir, anggota Polri itu punya dekrit sebagai penyidik sesuai KUHAP.

Pendeknya, semua masukan dapat dikumpulkan terkait rencana pelibatan TNI dalam upaya memerangi terorisme. Tidak harus tergesa-gesa, tapi juga jangan berlama-lama. Jangan pula melulu mengatakan bahwa institusi militer belum layak dipercaya mendapat tugas tersebut hanya gara-gara kenangan buruk kita tentang keterlibatan TNI dalam politik oleh rezim Orde Baru. Kalau memori masa silam yang menjadi hambatannya, muncul kecurigaan jangan-jangan sebagian komponen bangsa yang reaktif itu masih terbelenggu dalam kebencian sehingga selalu bersikap “ABM” (Asal Buka Militer).

Sikap traumatic jelas tidak boleh dibiarkan mengendap di relung hati. Bagaimanapun TNI adalah bagian dari bangsa ini. Kita butuh bantuan mereka, sebagaimana mereka juga perlu dukungan kita. Jadi, kita harus obyektif memikirkannya seraya menyadari bahwa musuh bersama kita itu sedemikian berbahayanya. Ia bersembunyi, ia bahkan mengenakan jubah agama dan berbicara atas nama agama. Kita bisa saja terkecoh karenanya, sementara bom lagi-lagi meledak tanpa kita sempat menghindar apalagi mencegahnya.

Kepustakaan

Balasuriya, Tissa, *Teologi Siarah*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.

Cassanova, Josse, *Public Religions in the Modern World*, Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilization and the Remaking of The World Order*, New York: Simon and Schuster Inc., 1997.

Juergensmeyer, Mark, *Terorisme Para Pembela Agama* (terj. Amien Rozany Pane), Yogyakarta: Tarawang Press, 2003.

Kutz, Lester R. dan Jennifer, "Menguraikan Jaringan Kekerasan", *dalam Teori-Teori Kekerasan*, oleh Thomas Santoso (ed.), Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002.

Laquer, Walter, "Reflections on Terrorism", *dalam The Global Agenda, Issues and Perspectives*, oleh Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf (ed.), New York, McGraw-Hill, Inc., 1992.

Spencer, Robert, *Islam Ditelanjangi* (terj. Mun'im A. Sirry), Jakarta: Paramadina, 2003.